

ABSTRAK
**PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENJATUHAN
SANKSI PIDANA ATAS KASUS PELANGGARAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) DALAM KEGIATAN PRODUKSI BARANG
ELEKTRONIK**

Nodika Permata Shabyra
1387058

Undang-undang Nomor No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian diterbitkan sebagai representasi konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin kegiatan di bidang perindustrian terkait Standarisasi barang dan jasa. Pengaturan mengenai Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) secara khusus diatur juga di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2002 tentang Standarisasi Nasional. Penerapan sanksi pidana tanpa didahului sanksi-sanksi sebelumnya tanpa menerapkan fungsi dari hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* dianggap telah terjadi inkonsistensi antara undang-undang yang pengaturan dan derajatnya sama maupun terhadap peraturan di bawah undang-undang, sehingga perlu dikaji mengenai penerapan prinsip *ultimatum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana atas kasus pelanggaran Standar Nasional Indonesia dalam produksi barang elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode Yuridis Normatif ini dimulai dengan analisa terhadap konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan SNI, khususnya terkait penerapan sanksi yang berbeda terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan label terhadap objek dagangnya.

Pelanggaran atas kewajiban SNI tidak harus dikenakan sanksi pidana, karena pada dasarnya sanksi yang harus ditegakkan terlebih dahulu adalah sanksi perdata dan sanksi administratif, jika kedua sanksi tersebut tidak dapat ditegakkan, maka disitulah fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Dalam hukum bisnis juga dikenal adanya *administrative penal law*. Jika penjatuhan sanksi pidana terlebih dahulu tanpa didahului sanksi-sanksi lain, maka dianggap telah terjadi inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : **Penjatuhan Sanksi, SNI, *Ultimum Remedium***

ABSTRACT
THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF *ULTIMATUM REMEDIUM*
IN THE IMPOSITION OF PENAL SANCTIONS FOR CASES OF
VIOLATION OF THE INDONESIAN NATIONAL STANDARD IN THE
PRODUCTION OF ELECTRONIC GOODS

Nodika Permata Shabyra
1387058

The Law No. 20 Year 2014 on the Standardization and Properness Assessment was promulgated as a representation of the constitution of the Republic of Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in order to guarantee the activities in the fields of industry related to the standardization of goods and services. The regulation on the Indonesian National Standard (*Standar Nasional Indonesia*, SNI) was also specifically contained within the provisions of the Law No. 3 Year 2014 on Industries and the Government Regulation No. 102 Year 2002 on National Standardization. The imposition of penal sanctions without being preceded by other sanctions and implementing the functions of the criminal law as the *ultimum remedium* is considered to be both an inconsistency between the Laws and Regulations of the same level and between the Laws and other regulations below them, so it is necessary to study the application of the principle of *ultimum remedium* in the imposition of penal sanctions for cases of violation of the Indonesian National Standard in the production of electronic goods.

This research utilizes the juridical-normative research method by exposing and analyzing the legal sources and issues related to the research questions. The normative research method utilizes secondary data which are composed of primary and secondary legal sources. This juridical-normative research is initialized by analyzing the legal concepts and principles which are used to regulate the implementation of SNI, particularly in relations to the implementation of different sanctions to the business actors who neglect to label their products.

The violation to the SNI requirement does not always constitute a penal sanction, because in principle the administrative and civil sanctions are to be imposed beforehand. In cases where both kind of sanctions cannot be imposed, the function of criminal law as the *ultimum remedium* can be observed. In the business law, there is also the administrative penal law. If the penal sanctions are imposed without being preceded by other sanctions, it can be considered as an inconsistency within the legal stipulations.

Keywords: *Sanction imposition, SNI, ultimum remedium*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	8
E. Kerangka Pemikiran	9

F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Jenis Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM, HUKUM BISNIS DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
A. Hukum	22
1. Negara Hukum	22
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	26
3. Arti dan Pembagian Hukum	28
a. Beberapa Batasan Hukum	28
b. Pembagian Hukum dari Berbagai segi	30
c. Sanksi Hukum	33
B. Hukum Bisnis dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan Kegiatan Bisnis	35
1. Definisi Bisnis	35
2. Definisi Hukum Bisnis	37
3. Administrative Penal Law	38
C. Hukum Pidana	40

1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli	40
2. Sifat Hukum Pidana	43
3. Tujuan Hukum Pidana	46
4. Fungsi Hukum Pidana	49

BAB III : PENGATURAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI INDONESIA

A. Sejarah Pengaturan SNI	57
B. Pengaturan SNI Pada Umumnya	61
1. Tujuan Penerapan SNI	64
2. Ruang Lingkup SNI	66
3. Sistem Penerapan SNI	67
4. Sanksi	68
C. Pengaturan SNI Di Bidang Industri	69
D. Parameter Pengujian SNI Produk Elektronik	71
E. Kronologi Kasus Pelanggaran SNI Di Bidang Industri	72

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS KASUS PELANGGARAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DALAM KEGIATAN PRODUKSI BARANG ELEKTRONIK.

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pelanggaran Atas Kewajiban SNI	74
B. Konsistensi Penjatuhan Sanksi Atas Tindakan Pelanggaran SNI Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Lainnya	87
1. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran SNI Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian	87
2. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran SNI Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	88
3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran SNI Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2002 tentang Standarisasi Nasional	90
4. Konsistensi Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran SNI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

